

PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI

Oleh: Ajat Sudrajat

FPIPS IKIP Yogyakarta

Abstrak

Gagasan masyarakat madani yang menjadi wacana baru dalam hidup kenegaraan memperoleh respon positif tidak saja dari kalangan intelektual tetapi juga dari pejabat tinggi negara di Indonesia, termasuk Presiden BJ. Habibie dan Menhankam Wiranto. Bahkan secara retorik mereka mengemukakan bahwa Indonesia masa depan adalah Indonesia dalam format masyarakat madani. Karena itu, semua potensi negara, baik politik, sosial, ekonomi, militer, dan pendidikan diarahkan untuk menuju masyarakat madani.

Masyarakat madani setidaknya memiliki tiga ciri, yaitu (1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat ketika berhadapan dengan negara, (2) adanya ruang publik yang bebas bagi individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengekspresikan aktivitas politiknya, dan (3) adanya kemampuan individu dan kelompok dalam masyarakat dalam menghadapi intervensi pemerintah atau negara.

Pendidikan Islam, sebagai bagian dari potensi pendidikan nasional, ikut pula bertanggung jawab untuk menuju masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik dalam pendidikan Islam, baik dari segi kelembagaan, proses pendidikan dan materi pendidikan yang harus mengalami pembaharuan sehingga pendidikan Islam akan melahirkan bentuk kelembagaan yang mandiri dan menghasilkan manusia siap menghadapi tantangan kehidupan serta bersikap toleran dalam menghadapi perbedaan.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Masyarakat Madani.

ISLAMIC EDUCATION TOWARD A CIVIL SOCIETY

Abstract

The concept of a civil society which has become a new discourse in the life of a nation has received positive response not only from the intellectual circles but also from high-ranking government officials in Indonesia, including President BJ Habibie and Minister of Defence and Security, General Wiranto. They have even rethorically expressed the idea of a future Indonesia in a civil society format. Therefore, all the nation's political, social, economic, military, and educational potential is being directed towards such a society.

A civil society has at least three characteristics, i.e., (1) there is a sufficiently high degree of autonomy of individuals and groups in the society in their interaction with the state, (2) there is free public space for the expression of individual and group political activity in the society, and (3) there is an individual and group capacity of refusing state or government intervention in the society.

Islamic education, as part of the national educational potential, has a share in the responsibility of building a civil society. For that, there are characteristics of Islamic education which, in terms of institutional matter, educational process, and educational material, need to undergo reformation. Only then Islamic education result in a self-supporting institution and produce human resources prepared to confront life's challenges and filled with enough tolerant attitude in the face of differences.

Pendahuluan

Wacana intelektual yang berkembang di Indonesia dewasa ini memperoleh tambahan wacana baru yaitu dengan munculnya gagasan masyarakat madani (*civil society*). Kecenderungan terhadap gagasan ini tidak saja terlihat di kalangan intelektual tetapi juga di kalangan pejabat negara. Secara retorik, gagasan tentang masyarakat madani ini tidak hanya dikemukakan oleh Presiden BJ. Habibie dalam berbagai kesempatan tetapi yang menarik justru gagasan ini dikemukakan pula oleh petinggi militer, termasuk oleh Menhankam Wiranto. Satu lembaga kenegaraan yang dituding sering berlaku tidak demokratis. Baik kalangan intelektual maupun pejabat, hampir semuanya mengemukakan Indonesia masa depan adalah Indonesia yang memiliki format masyarakat madani. Konsekuensi dari gagasan yang demikian menyebabkan semua aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan negara, baik politik, sosial, ekonomi, militer, dan pendidikan secara serempak diarahkan menuju format masyarakat madani tersebut.

Dalam tulisan ini, fokus pembahasan ditekankan pada bidang pendidikan. Namun demikian, pendidikan yang dimaksudkan di sini lebih spesifik pada pendidikan Islam. Penekanan yang spesifik ini didasari suatu pertimbangan bahwa di Indonesia terdapat pendidikan

Islam yang berperan besar dalam membangun corak pemikiran dan kehidupan masyarakat, baik pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tulisan ini akan menelusuri karakteristik yang melekat pada pendidikan Islam dan apakah ia memiliki prasyarat untuk menuju masyarakat madani. Namun sebelum itu, untuk mengutuhkannya tulisan ini, akan ditelusuri pula perkembangan selintas gagasan masyarakat madani dan karakteristiknya sehingga dengan demikian akan terjadi afinitas dalam tulisan ini.

Selintas tentang Gagasan dan Karakteristik Masyarakat Madani.

Gagasan dan praksis masyarakat madani atau *civil society* merupakan produk sejarah dan masyarakat modern (Gellner, 1995: 230). Ia menyatakan bahwa masyarakat madani mendapatkan pembenaran, sekurang-kurangnya sebagian dari fakta bahwa masyarakat ini mustahil untuk kembali ke masyarakat agraris yang mandeg dan tradisional. Masyarakat madani merupakan nasib nyata dari perjalanan sejarah di satu pihak dan merupakan akibat sosial yang unik dari cara hidup ilmiah-industrial di pihak lain (Gellner, 1995: 230-231). Karenanya bisa dikatakan bahwa masyarakat madani muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama sekali pada saat terjadinya perubahan dari masyarakat feodal agraris menuju masyarakat industrial-kapitalis.

Orang yang pertama kali menggunakan dan mengembangkan istilah masyarakat madani adalah Adam Ferguson, seorang pemikir pencerahan dari Skotlandia pada abad ke-18. Gagasan masyarakat madani karenanya dapat dikatakan sebagai anak kandung dari filsafat pencerahan (*Enlightment*), yang kemudian meretas jalan bagi munculnya sekularisme yang menggantikan agama dan sistem politik demokrasi yang menggantikan sistem monarki (Hikam, 1996: 224).

Perkembangan gagasan masyarakat madani untuk selanjutnya mengikuti konseptualisasi Hegel yang memilah kehidupan modern menjadi tiga bagian: keluarga, masyarakat madani, dan negara. Keluarga merupakan ruang pribadi yang ditandai oleh hubungan individual yang harmonis dan menjadi tempat sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat. Masyarakat madani adalah lokasi bagi pemenuhan kepentingan individu dan kelompok, terutama kepentingan ekonominya. Dalam hal ini, Hegel tidak menganggap masyarakat madani sebagai arena bagi praksis politik yang menurutnya adalah monopoli negara. Negara merupakan representasi dari ide universal yang melindungi kepentingan politik warga negaranya dan karenanya ia memiliki hak

yang penuh untuk melakukan intervensi terhadap masyarakat madani (Hikam, 1996: 224).

Model Hegelian ini ditolak oleh Alexis de Tocqueville yang memandang masyarakat madani sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik di dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menekan intervensi negara. Di dalam bukunya yang berjudul *De la Democratie en Amerique*, yang terbit tahun 1835-1840, ia menunjukkan bagaimana demokrasi dijalankan oleh bangsa itu melalui masyarakat madani, pengelompokan sukarela dalam masyarakat, termasuk gereja dan asosiasi-asosiasi profesional, yang gandrung pada pembuatan keputusan di tingkat lokal dan menghindari intervensi negara. Masyarakat madani yang berkembang di Amerika dan Eropa kemudian menjadi basis kehidupan demokrasi modern yang dilandasi prinsip toleransi, desentralisasi, sukarela, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik dan konstutualisme (Hikam, 1996: 225).

Menurut A.S. Hikam, gagasan masyarakat madani Tocquenville itulah yang kemudian diangkat sebagai paradigma alternatif oleh para aktivis prodemokrasi di penghujung abad 20. Pangkal penyebabnya adalah kegagalan sistem tertutup dalam memberi peluang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang politik yang dilakukan oleh rezim-rezim totaliter dan otoriter. Dalam paradigma masyarakat madani itulah diusahakan mengembalikan harkat warga negara sebagai pemilik kedaulatan.

Oleh karena itu, seperti yang dikonsepsikan para pelopornya, masyarakat madani setidaknya memiliki tiga ciri utama: 1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari para individu dan kelompok dalam masyarakat ketika berhadapan dengan negara; 2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik; dan 3) adanya kemampuan membatasi kekuasaan negara agar ia tidak intervensionis. Dengan ciri-ciri tersebut, dalam pengertian yang paling sederhana, yang secara intuitif jelas dan dekat, yang juga memiliki banyak segi positif, adalah bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai intuisi nonpemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara. Meskipun dalam hal ini masyarakat madani tidak menghalangi negara dari memenuhi peranannya sebagai penjaga perdamaian dan sebagai wasit diantara berbagai kepentingan besar tetapi ia dapat menghalangi negara dari mendominasi masyarakat. Masyarakat madani dapat mengendalikan dan menentang negara; *civil society* tidak loyo di hadapan negara (Gellner, 1995: 6).

Sekalipun secara diametral masyarakat madani dihadapkan dengan negara karena setiap kelompok dan asosiasi otonom menerima eksistensinya tetapi masyarakat madani juga memerlukan standar-standar perilaku. Kegiatan, baik dalam masyarakat madani itu sendiri, dan antara masyarakat madani dengan negara, semestinya diikat oleh aturan-aturan bersama yang merupakan kerangka hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Persamaan, partisipasi dan keterlibatan politik, bersikap toleran terhadap pandangan yang berbeda, barangkali merupakan dasar dari masyarakat madani. Secara ideal masyarakat madani ditandai oleh adanya hak setiap warga negara untuk berhubungan dengan pemerintah yang representatif dan bertanggung jawab (Al-Hassan Bin Talal, 1997: 99).

Karakteristik Pendidikan Islam di Indonesia

Dalam studi kependidikan, sebutan "pendidikan Islam" pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Penyebutan yang lebih spesifik bisa juga dilihat dari bentuk kelembagaannya, seperti Pesantren, Madrasah dan Sekolah Agama (Steenbrink, 1986). Tetapi setidaknya ada tiga unsur penting yang dapat dilihat dari sebutan pendidikan Islam. Pertama, berkaitan dengan kelembagaan (institusi). Kedua, berkaitan dengan proses pendidikan yang terjadi di dalam lembaganya yang disemangati ruh Islam. Ketiga, berkaitan dengan *subject matter* atau materi pendidikan yang diberikan pada lembaga yang bersangkutan. *Subject matter* di sini harus dipahami bukan sekadar mata pelajaran pendidikan Agama Islam akan tetapi seluruh mata pelajaran yang dapat menyadarkan peserta didik akan posisinya sebagai manusia seperti yang dikehendaki dalam konsep Islam. Manusia yang lahir dari pendidikan Islam adalah manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal dan anggun dalam moral. Dalam konteks ini, sekolah-sekolah yang hanya menyisipkan 2 jam pelajaran pendidikan agama Islam, belum bisa dimasukkan dalam klasifikasi pendidikan Islam (Idrus, 1997: 83).

a. Karakteristik Kelembagaan

Secara umum kelembagaan pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia dapat digolongkan pada pendidikan Islam yang formal dan nonformal. Pendidikan Islam yang formal adalah lembaga pendidikan yang dalam penyelenggaraannya secara resmi mengikuti aturan main yang ditetapkan pemerintah. Kelembagaan pendidikan Islam ini meliputi semua

tingkat dari TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan IAIN atau Pendidikan Tinggi yang bercorak keagamaan Islam. Sementara pendidikan Islam nonformal adalah lembaga pendidikan Islam yang kegiatan dan penyelenggaraannya diatur oleh lembaga yang bersangkutan lepas dari ketetapan pemerintah. Lembaga pendidikan dalam kategori ini antara lain pesantren dan majelis taklim.

Pada lembaga pendidikan Islam nonformal, penyelenggara pendidikan pada umumnya adalah masyarakat, baik itu berupa organisasi keagamaan atau kelompok masyarakat. Dalam pendidikan formal, penyelenggara pendidikan terbelah menjadi dua, yaitu pemerintah dan masyarakat. Untuk pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah biasa disebut dengan madrasah atau perguruan tinggi negeri sedangkan yang penyelenggaranya masyarakat dikenal dengan madrasah atau perguruan tinggi swasta.

Pada sekolah-sekolah negeri ketergantungan kepada pemerintah sangat besar, terutama apabila hal itu dikaitkan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan alasan ini pula maka akan sangat mudah bagi pemerintah atau negara untuk melakukan intervensi di dalamnya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah-sekolah swasta, sekalipun dalam penyelenggaraan pendidikan mengikuti sejumlah ketetapan pemerintah, lembaga pendidikan ini memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi dibanding sekolah negeri. Oleh karena itu, pemerintah atau negara tidak bisa dengan mudah melakukan intervensi di dalamnya.

Berkaitan dengan keberadaan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, lembaga ini telah teruji kemandiriannya ketika berhadapan dengan pemerintah atau negara. Sejarah telah memperlihatkan bagaimana peran yang telah dimainkan oleh lembaga pendidikan pesantren selama masa kolonial maupun selama masa kemerdekaan. Lembaga ini tidak bisa dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah, dan bagaimana pula lembaga ini telah dipengaruhi kebijakan pemerintah.

Lembaga pendidikan Islam nonformal yang lain adalah majelis taklim atau kelompok-kelompok pengajian. Majelis taklim atau kelompok-kelompok pengajian ini berasal dari kelompok pengajian yang diikuti oleh masyarakat secara umum, terutama oleh kaum ibu dan bapak-bapak. Penyelenggaraan pengajian ini pun umumnya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu, mingguan, dua mingguan atau bulanan. Dalam perkembangannya, majelis taklim atau

kelompok pengajian ini semakin meluas ke semua kalangan dan bahkan di kalangan profesional. Karena itu, bisa dilihat adanya kelompok pengajian khusus untuk kalangan para artis, dokter, karyawan-karyarwan perusahaan, dosen-dosen, dan lainnya.

b. Karakteristik Proses Pendidikan

Proses pendidikan yang terutama menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Untuk menelusuri hubungan antara pendidik dan peserta didik ini terlebih dahulu akan dilihat pengertian dasar mengenai pendidikan dalam Islam.

Ada tiga kata dalam tradisi Islam yang berkaitan dengan pendidikan. Ketiga kata ini dapat dijadikan bahan analisis terhadap proses pendidikan yang selama ini dilakukan di lingkungan umat Islam. Pertama, *tarbiyah*, berasal dari kata *raba*, yang berarti tumbuh atau meningkat. *Tarbiyah* di sini menunjuk suatu proses yang berorientasi pada pertumbuhan keadaan sikap mental dan kepribadian peserta didik dari tingkat kanak-kanak sampai mencapai kematangan atau kedewasaan. Kedua, *ta'dib*, berasal dari kata *aduba* yang berarti memperhalus dan menjadikan seseorang terpelajar, beradab atau berbudaya, dari kata inilah kita memperoleh istilah peradaban. Kata ini menunjuk pada proses belajar yang didasarkan dan disandarkan kepada perilaku sosial dalam suatu komunitas dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini meliputi usaha-usaha untuk memahami prinsip-prinsip sosial yang sangat fundamental, seperti prinsip persamaan, keadilan, toleransi dan lain-lain. Ketiga, *ta'lim*, berasal dari kata *'alima* yang berarti mengetahui atau menginformasikan. Kata ini menunjuk pada usaha untuk menanamkan dan memberikan pengetahuan, biasanya dilakukan melalui latihan, pelajaran atau bentuk pengajaran yang lain (Halstead, 1995: 27)

Penekanan yang berbeda dari tiga istilah di atas memberikan kemungkinan untuk menganalisis proses pendidikan dalam pengertian (1) membantu perkembangan individu peserta didik; (2) meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena dirinya adalah bagian dari padanya; dan (3) mentransmisikan pengetahuan, yang dalam hal ini tidak eksklusif pada ilmu-ilmu keislaman saja. Ada tiga aspek kehidupan individu peserta didik yang sangat diperhatikan di sini yaitu aspek mental, sosial dan intelek.

Diakui bersama bahwa tujuan yang fundamental pendidikan dalam Islam adalah menjadikan peserta didik

tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik adalah adanya pemahaman terhadap konsep Islam mengenai kehidupan. Pribadi yang menyadari bahwa seluruh kehidupannya adalah dalam rangka merespon segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah. Dengan demikian ada kesadaran yang penuh mengenai tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Untuk menjadi pribadi yang baik, maka seorang pendidik dituntut memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan ranah mental, sosial dan intelektual peserta didik.

c. Karakteristik Materi Pendidikan

Dalam lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam dewasa ini, baik yang formal maupun nonformal, materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik boleh dikatakan seragam. Pendidikan yang diberikan adalah materi-materi pokok keislaman yang berkisar di seputar akidah, syariah, muamalah, dan ahlak. Terutama pada pendidikan Islam nonformal seperti pesantren dan majelis taklim, materi yang diberikan adalah murni keislaman. Walaupun terjadi sedikit perbedaan, terutama pada pendidikan formal, karena pada lembaga tersebut sudah memberikan materi pendidikan yang bersifat umum. Adanya penekanan materi keislaman di lingkungan pendidikan Islam sebenarnya bisa dimengerti karena dalam kajian studi Islam banyak sekali disiplin-disiplin keilmuan Islam yang memang harus dipelajari secara baik dan mendalam. Penekanan ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam mengabaikan pentingnya ilmu-ilmu umum.

Konsep Islam tentang ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak membuat dikotomi antara ilmu agama dan umum. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Allah, Sang Pencipta. Semua ilmu pengetahuan lahir pada saat atau ketika manusia berpikir tentang Allah dan semua ciptaannya. Allah adalah Dzat yang mencipta dan pada setiap ciptaan-Nya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku padanya. Ada *sunnatullah* (ketentuan-ketentuan Allah) yang melekat pada setiap ciptaan-Nya. Istilah *sunnatullah* ini disepadankan dengan istilah hukum alam. Ketika manusia berpikir tentang sunnatullah yang berlaku pada ciptaan-Nya maka cabang-cabang ilmu pengetahuan lahir darinya baik itu berupa ilmu kealaman, sosial atau humaniora. Secara khusus Allah pun telah memberikan petunjuk kehidupan kepada manusia. Pada saat manusia memikirkan tentang Allah dan petunjuk-Nya, pada saat itu pula lahir ilmu keagamaan (keislaman). Untuk sementara ini pendidikan Islam memang masih banyak yang terfokus pada ilmu-ilmu keagamaan (keislaman)

carena dalam pandangan mereka, mencari petunjuk yang benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah adalah merupakan hal yang utama. Pada saatnya dan nampaknya sudah mulai dirintis, pendidikan Islam akan mengembangkan juga bidang-bidang keilmuan yang lain. Bidang keilmuan ini sudah sedemikian pesat dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum.

Problematika Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani

Dengan memperhatikan karakteristik yang melekat pada pendidikan Islam di atas, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan ketika pendidikan Islam diadapkan dengan masyarakat madani. Seperti telah disebutkan sebelumnya, prasyarat masyarakat madani adalah adanya kemandirian atau otonomi yang kuat dalam kehidupan individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah atau negara, adanya ruang publik yang bebas bagi keterlibatan individu dan kelompok masyarakat dalam berpolitik, adanya sikap toleransi ketika berhadapan dengan pandangan yang berbeda, dan adanya persamaan perlakuan bagi individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan negara.

Memperhatikan prasyarat masyarakat madani di atas dikaitkan dengan karakteristik pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini akan ditemukan beberapa problematika yang harus dicari pemecahannya. Pertama berkaitan dengan karakteristik kelembagaan pendidikan Islam. Secara kelembagaan, lembaga pendidikan Islam sebenarnya di satu sisi sudah memenuhi prasyarat masyarakat madani karena pada umumnya lembaga pendidikan Islam sudah banyak yang mandiri dan memiliki otonomi yang kuat. Di antaranya yang paling otonom adalah lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, Matla'ul Anwar, dan lain-lain. Di sisi lain, sekalipun lembaga pendidikan ini sudah mandiri dan otonom, persoalan yang sering dihadapi mereka adalah penyelenggaraan pendidikan yang tidak profesional. Hal ini diakibatkan karena kurangnya dana yang dapat digunakan untuk memajukan lembaga pendidikan ini. Sebagai akibatnya, mereka sering meminta bantuan kepada pemerintah dan dengan alasan ini pemerintah dapat melakukan intervensi terhadapnya.

Dalam rangka menguatkan keberadaan dan otonomi pendidikan Islam, pendidikan Islam semestinya diselenggarakan dengan menggunakan pengelolaan yang profesional khususnya dengan lembaga pendidikan pesantren yang selama ini pengelolaannya bersifat

tradisional. Tanpa dilakukan pembenahan baik menyangkut kelembagaannya, proses pendidikan, dan materi pendidikannya, pesantren akan tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang tertinggal sekalipun barangkali tetap memiliki otonomi dan kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan pemerintah atau negara.

Kedua, berkaitan dengan proses pendidikan. Karakteristik yang melekat berkaitan dengan proses pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dengan karakteristik kelembagaannya. Pendidikan Islam di Indonesia seperti disebutkan di atas, pada umumnya diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, yang secara eksklusif mengembangkan corak pemikiran keagamaan tertentu. Pada tingkat tertentu, eksklusivitas corak pemikiran keagamaan yang dikembangkan lembaga pendidikan tersebut mewarnai corak pemikiran peserta didiknya. Proses pendidikan yang demikian sering menimbulkan kekakuan perilaku keagamaan ketika berhubungan dengan perilaku keagamaan yang lain sehingga kadang-kadang menimbulkan sikap yang tidak toleran terhadap orang yang berbeda pikiran dengannya.

Menghadapi kemungkinan ini, seperti disebutkan di atas, tugas pendidik tidak semata membimbing sikap mental dan mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga adalah sikap sosialnya. Sikap sosial ini perlu diperkuat dengan memperkenalkan peserta didik pada nilai-nilai fundamental yang berlaku di masyarakat dan kenyataan sosial yang akan dihadapinya. Kenyataan sosial memperlihatkan adanya keragaman dalam berbagai corak pemikiran keagamaan, oleh karena itu harus ditanamkan sikap untuk menghargai perbedaan. Perbedaan itu tidak saja terjadi pada corak keagamaan, tetapi perbedaan-perbedaan itu akan tampak juga dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan diperkenalkannya peserta didik pada kenyataan keragaman kehidupan dalam masyarakat, dengan dibimbing oleh nilai-nilai spiritual ajaran agama maka akan menghasilkan manusia yang memiliki jiwa yang toleran.

Ketiga, materi pendidikan. Seperti disebutkan di atas, materi pendidikan Islam pada umumnya terkait dengan materi pokok ajaran Islam terutama pada materi akidah. Pada materi akidah peserta didik akan memperoleh keyakinan bahwa agama yang benar hanyalah agama Islam. Agama di luar Islam adalah salah. Orang-orang yang menganut agama di luar Islam adalah kafir. Kemudian pada materi syariah, peserta didik akan memperoleh keyakinan bahwa hanya syariah Islamlah yang akan mengantarkan jalan keselamatan umat manusia.

Adanya klaim kebenaran akidah dan syariah Islam bukanlah sesuatu yang salah. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah hal itu berakibat pada sikap tidak tolerannya umat Islam ketika berhadapan dengan umat beragama lain atau kemudian memunculkan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang beragama lain dan tidak bersikap demokratis terhadapnya. Diakui bahwa kemungkinan agama sering menimbulkan sikap tidak toleran disebabkan klaim kebenaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh masing-masing pemeluk agama akan memiliki klaim kebenaran yang sama.

Untuk menghadapi kemungkinan ini dan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai keyakinan yang berbeda akan tidak mungkin apabila dalam materi pendidikan Islam ditambahkan dengan materi perbandingan agama dengan catatan bahwa materi ini diberikan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif. Materi ini diberikan untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan bersama, tidak untuk saling menjatuhkan atau menyalahkan satu sama lain karena selama ini juga diberikan materi yang serupa tetapi masih dalam lingkup keagamaan Islam yaitu perbandingan mazhab. Dengan demikian sikap intoleransi dan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda agama dapat dihindari. Dari sini peserta didik diharapkan tidak lagi memiliki wawasan yang eksklusif akan tetapi juga memiliki sikap yang terbuka, rendah hati dan inklusif.

Sudah tiba saatnya bagi penyelenggara pendidikan Islam untuk mengembangkan berbagai keilmuan di luar ilmu keagamaan (keislaman) di lingkungannya secara integratif. Dimilikinya pengetahuan yang bercorak kealaman, sosial dan humaniora oleh para peserta didik akan sangat membantu mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan. Mereka memiliki kesiapan dan kemandirian untuk bertarung di arena kehidupan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat madani yang menjadi format ideal masa depan Indonesia adalah negara yang menghargai eksistensi individu dan kelompok masyarakat dan tidak bersikap represif dan kooptatif, negara yang bersikap jujur dan adil dalam memperlakukan masyarakatnya memberi peluang

- dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan negara dan juga adanya sikap toleran dan menghargai perbedaan di antara masyarakat.
- 2. Pendidikan Islam terutama lembaga pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, Matla'ul Anwar, dan ormas lainnya, selama ini telah memiliki tingkat kemandirian dan otonomi ketika berhadapan dengan pemerintah. Untuk memperkuat kemandirian ini perlu diupayakan profesionalisme penyelenggaraan dan penggalan dana dari masyarakat.
- 3. Pendidikan Islam, terutama pada dimensi proses dan materi pendidikan, sudah saatnya diarahkan untuk menumbuhkan sikap peserta didik atau manusia-manusia yang tidak hanya memiliki keyakinan yang kuat pada agamanya tetapi juga bersikap rendah hati, toleran dan inklusif ketika menghadapi perbedaan, terutama pada perbedaan corak pemikiran yang bersifat keagamaan. Hal ini harus dilakukan karena disadari seringkali konflik-konflik muncul disebabkan oleh eksklusifitas keagamaan.

Daftar Pustaka

- Gellner, Ernest. (1995). *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Halstead, J. Mark. (1995). "Towards a Unified View of Islamic Education". *Islam and Christian-Moslem Relation*, 6 (1), 27.
- Hikam, Muhammad AS. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Idrus, Muhammad. (1997). "Perubahan Masyarakat dan Peran Pendidikan Islam". Dalam Muslih Usa dan Aden Wijdan (ed.). *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, hlm. 83. Yogyakarta: Aditty Media.
- Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Talal, Al-Hasan Bin. (1997). "Documentation: Islam and Civil Society". *Islam and Christian-Moslem Relation*, 8 (1), 45.

